

## **Siaran Pers**

### **PEMERINTAH BERKOMITMEN UNTUK MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM MEMPERBAIKI PELAYANAN KESEHATAN**

**JAKARTA** – Masih banyak masyarakat miskin (termasuk kelompok 40 persen berpendapatan terendah) yang belum mendapatkan pelayanan dasar secara optimal dalam kesehatan. Tahun 2012, ada 47 persen balita dari kelompok ini yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan 42 persen ibu melahirkan di luar fasilitas kesehatan (Sumber: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI). Padahal, masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan berpeluang lebih kecil untuk bisa keluar dari rantai kemiskinan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah mempunyai sasaran yang ambisius untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan. Karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan seminar Peningkatan Akuntabilitas Sosial antara Masyarakat dan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan pada tanggal 27 April 2016.

Seminar dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD dan bertujuan untuk mengolah masukan guna mempersiapkan strategi kebijakan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat untuk perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada khususnya dan dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa pada umumnya, sebagaimana amanat Undang Undang Desa, Tahun 2014.

Menurut Menteri Sofyan Djalil, akuntabilitas sosial adalah interaksi masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pemberi layanan sehingga kebijakan dan kegiatan yang dilakukan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, termasuk dalam hal pelayanan dasar. “Akuntabilitas sosial ini penting sebagai upaya menyeimbangkan antara demand masyarakat atas pelayanan dasar dan supply berupa kapasitas pemerintah dan pemberi layanan untuk menyediakannya,” jelas Menteri Sofyan Djalil.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rudy S. Prawiradinata, menyebutkan bahwa akuntabilitas sosial ini pada dasarnya adalah untuk menyuarkan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi sekaligus mendorong pemerintah dan penyedia layanan untuk dapat melaksanakan kewajiban pelayanannya.

“Akuntabilitas sosial sangat membantu masyarakat dalam menyuarkan kebutuhannya, mengawasi kualitas penyediaan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan membantu memberi masukan bagi pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran. Sementara bagi pemerintah dan pemberi layanan, akuntabilitas sosial dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi kebocoran,” tutur Rudy Prawiradinata, kepada media.

Seminar yang digelar ini juga menampilkan kisah sukses dan pelajaran yang bisa diambil dari berbagai program yang menggunakan akuntabilitas sosial di Indonesia, seperti Kinerja, ACCESS, LOGICA, PNPM Mandiri, dan SELARAS. Secara mendalam, seminar ini juga memaparkan program Suara dan Aksi Masyarakat (Citizen Voice and Action atau CVA) di Kabupaten Sikka, NTT yang dikelola oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja sama dengan Bank Dunia.

CVA berupaya meningkatkan dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan penyedia layanan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan. Para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara langsung aktivitas dan proses yang berlangsung serta dampak yang mereka rasakan dari program yang telah berlangsung sejak 2014 ini.

Salah satu manfaat dari program ini, masyarakat menjadi paham mengenai Standar Pelayanan Minimum yang menjadi hak mereka. Secara terarah, masyarakat menjadi lebih berani untuk berdialog secara kritis dengan pemerintah daerah dan pemberi layanan. Di sisi lain, Pemda dan pemberi layanan memperoleh data konkret dari masyarakat sebagai bahan perencanaan dan penganggaran. Dampak nyatanya, di Sikka tenaga kesehatan selalu datang tepat waktu, bidan konsisten hadir di desa-desa, Pemda menambah anggaran untuk menyubsidi paket bantuan melahirkan bagi ibu hamil, juga Kepala Desa menambah tenaga perawat dan bidan dengan menggunakan dana desa yang ada.

Selain memperkenalkan pendekatan dan praktek akuntabilitas sosial, seminar ini diharapkan dapat memberi masukan berharga untuk peningkatan pelayanan dasar dan perencanaan pembangunan yang partisipatif di desa. Tidak hanya itu, masukan-masukan ini akan bermanfaat dalam memperkuat masyarakat sipil, memperkuat demokrasi, dan membentuk pemerintahan yang bersih, efektif, serta responsif.

Jakarta, 27 April 2016

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon (021) 31936207, 3905650;  
Faksimile (021) 3145374  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)